****

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**FGD Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dalam Rangka Penelitian tentang**

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL”**

Jakarta, 11 Juli 2019

“Kenaikan peringkat logistik Indonesia belum diiringi dengan penurunan biaya logistik. Berdasarkan data Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), biaya logistik Indonesia mencapai 25% terhadap PDB. Perbaikan sektor logistik perlu ditingkatkan terutama dengan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas. Nilai komponen infrastruktur dalam *Logistic Performance Index* 2018 merupakan terendah setelah custom. Naiknya peringkat logistik diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa aspek permasalahan logistik Indonesia, yaitu komoditi, infrastruktur, pelaku dan penyedia jasa logistik, SDM, teknologi informasi dan komunikasi, regulasi, serta kelembagaan.

Selain itu, ada beberapa hal juga yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar sistem logistik nasional dapat dijalankan secara efektif dalam mendorong peningkatan kinerja logistik pangan, yaitu penyediaan sistem informasi *demand* dan *supply* setiap jenis komoditas pangan; melakukan pemetaan dan studi komprehensif potensi dan karakteristik suatu daerah dalam menghasilkan komoditas pangan unggulan tertentu; dan mendorong kolaborasi antarperusahaan logistik untuk menyediakan layanan logistik yang efisien dan lancar (*seamless*).”

***(Zaroni)***